

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Fickar Hadjar ed. al, 2013. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN.
- Abdul Latief, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Abu Daud Busroh, 2010. *Ilmu Negara*, Cet. 7, Jakarta: Bumi Aksara,
- Ahmad Redi, 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 4, Bandung: CV Mandar Maju.
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2004.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum*, Cet. 4, Yogyakarta; Genta Publishing
- Helmi. 2010. *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup*, Cet 1, Bandung: UNPAD Press.
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2010. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT. Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Ashiddiqie. 2017. *Perihal Undang-Undang*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Ni'matul Huda, 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Terhadap Perubahan UUD. 1945)*, Yogyakarta: UII Press

- Mahendra Putra Kurnia, 2009. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Jilid 1, Cet 22, Yogyakarta: Kanisius.
- Moh Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet.II.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cet. 1, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pataniari Siahaan, 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Putera Astomo, 2018. *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers
- Ridwan, HR. 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Saldi Isra, 2018. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soebagio. 1976. *Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai Tempat Pengundangan dalam Kenyataan*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2014. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Cet. 5, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Supardan Modeong. 2007. *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Perca.
- Suparlan, 1982. *Perbandingan Lembaga Kepresiden Republik Indonesia dan Amerika Serikat*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Theo Huijbers, 2016. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: PT. Kanisius, Cet. 18.

Titik Triwulan Tutik, 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka.

Yuliandri, 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Makalah/Jurnal/Makalah Ilmiah/Artikel

Aminuddin, *Makna dan Implikasi Pergeseran kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Jurnal Pasca Sarjana UNPAD, 2010.

Helmi Chandra, “*Kedudukan UU Penyiaran Tanpa Tanda Tangan Presiden*” Jurnal PPKn dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2018.

Iskandar, Keabsahan Tindakan Pemerinatah, Jurnal Hukum, Universitas Bengkulu, No. 18, Edisi Oktober 2013.

C. Internet

<http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/70>

www.kemenkumham.go.id

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8758/ketua-mk-uu-tanpa-pengesahan-presiden-dapat-dibatalkan/>

<https://www.gatra.news.com>

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara No 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No.5234

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara No 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No.5234

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Lembaran Negara Nomor 199 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo